

POLICY BRIEF: STUDI KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Penulis: Zuliansyah P. Zulkarnain, Rusfi Yunairi, Ayi Mulyadi, Muh Azis Muslim, Adhiawan Soegiharto, Marcel Angwyn, Givo Aulia, Aminatul Maula

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada kondisi lingkungan global yang sangat dinamis, negara-negara di dunia saling berlomba-lomba untuk menciptakan kreativitasnya dan menunjukkan hasil kreativitas tersebut sebagai kekuatan dalam bidang ekonomi. Bahkan di banyak negara maju perhatian untuk peningkatan kreativitas terhadap kekayaan intelektual telah diwujudkan nyatakan dengan suatu lembaga IP Academy dengan titik sentral pada proses edukasi kekayaan intelektual.

Pada umumnya IP Academy menjalankan fungsi utama melakukan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk berbagai segmentasi target peserta seperti pemerintah, bisnis, UMKM, universitas dan sebagainya. Berkaca dari pengalaman negara-negara yang berhasil mengembangkan perekonomian melalui pengembangan kekayaan intelektual, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah membangun urgensi adanya suatu lembaga pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia (PIPKI) yang juga menjadi lembaga IP Academy. Hal ini berangkat dari tuntutan global yang semakin memperkuat arus persaingan kreativitas dan inovasi antarnegara.

Tiga fungsi utama dalam rangka peningkatan kekayaan intelektual yang saat ini dikembangkan adalah penciptaan, perlindungan, dan utilisasi. Lembaga PIPKI akan difungsikan untuk mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual mulai dari kreasi, proteksi, dan utilisasi kekayaan intelektual. Sehingga aktivitas di dalamnya tidak hanya perlindungan pelayanan kekayaan intelektual semata. Merujuk pada cakupan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh IP Academy, kerangka layanan yang diberikan oleh Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai

sebuah BLU meliputi: 1) Trainings; 2) Consultancy and advisory, dan 3) Information center.

Selama ini pelayanan kekayaan intelektual sebagai salah satu kontributor yang cukup besar menyumbang PNBPNBP belum memaksimalkan fungsinya pada aspek kreasi dan utilisasi, dengan kata lain hanya sebatas proteksi. Kontribusi PNBPNBP pada bidang kekayaan intelektual hingga tahun 2020 mencapai persentase 130% dari target dengan nilai 789.869.148.000 ini menjadi dasar kekuatan bagi DJKI dalam rangka mewujudkan keinginan untuk membangun suatu lembaga pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual. Untuk itu, langkah strategis yang perlu diperhatikan adalah terkait pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi fungsi dari pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual.

Sebagai proses awal, Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia dapat menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan milestone terutama pada aspek pelaksanaan dan sumber daya yang ingin dicapai dalam pengembangan kekayaan intelektual. Kajian ini secara khusus akan membahas mengenai kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang fungsi Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Grand Design Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual. Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia; dan Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia.



ANALISIS SWOT-PEST

1. Analisis Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang pertama berkaitan dengan Rencana Strategik DJKI tahun 2019-2014, dimana terdapat arah kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan yang berfokus pada penyediaan fungsi edukasi, pelayanan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual. DJKI sudah memiliki payung hukum yang kuat, yang mendasari pembentukan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual. Payung hukum ini dapat mengakomodir kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual.

Kekuatan lainnya ada pada sistem pelayanan yang diberikan. Sejumlah bentuk layanan yang diberikan oleh DJKI dalam perlindungan kekayaan intelektual, telah menggunakan sistem yang bersifat dalam jaringan (*online*). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa DJKI sudah menyelenggarakan pelayanan publik pada bidang kekayaan intelektual dengan baik, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadapnya.

2. Analisis Kelemahan (Weakness)

Jika mengacu pada *World Intellectual Property Office* (WIPO), terdapat sejumlah standar aktivitas pelayanan dan sarana prasarana pendukung dalam penyelenggaraan layanan kekayaan intelektual. Jika DJKI dan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual hendak memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, tentunya perlu melakukan *benchmarking* terhadap *best practices* yang ada di berbagai belahan dunia.

Beberapa sarana dan prasarana yang serupa antara lain adalah *Meeting room* yang dapat memfasilitasi pertemuan melalui *video conference website* yang menyediakan informasi, pelayanan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual seperti deskripsi pelayanan, prosedur pelayanan, biaya pelayanan, aktivitas termasuk *training* dan pendidikan, serta modul yang tersedia secara *online* dan mudah

diakses secara gratis. DJKI dan juga Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual perlu melakukan proses standardisasi atas sarana semacam ini.

Lebih lanjut, perlu juga dipertimbangkan mengenai kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam sub bab kebutuhan SDM. Secara kuantitatif, jumlah SDM yang berfokus pada isu kekayaan intelektual terus mengalami pengurangan. DJKI memiliki kelemahan dalam melaksanakan perlindungan Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI.

3. Analisis Peluang (Opportunity)-PEST

Peluang dari Faktor Politik

Faktor politik berkaitan dengan kebijakan maupun peraturan yang mendorong pemenuhan sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual. Kebijakan dan peraturan menuntut dibentuknya Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual, dan untuk mewujudkan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual yang dapat menjawab kebutuhan perlindungan kekayaan intelektual, maka diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung.

Peluang dari Faktor Ekonomi

Analisis Faktor Ekonomi masih berkaitan dengan salah satu bagian dari analisis faktor politik, dalam hal ini adalah *Major Project* Transformasi Digital. Mengacu pada trend potensi ekonomi digital, Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual dapat menggarap suatu kegiatan usaha yang menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan perlindungan HaKi di Indonesia. Dalam hal ini, Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual dapat memberikan penawaran dalam bentuk kursus singkat (*short course*), pelatihan dan pengembangan (*training and development*) bagi para *IP Officer*, maupun menyediakan layanan lainnya seperti pencatatan HaKi berupa Paten dan sebagainya. Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual juga dapat memungut bayaran atas layanan sebagai hub atau penghubung dari sejumlah stakeholders yang terlibat.



Peluang dari Faktor Sosial

Pada Faktor Sosial, terdapat 2 (dua) hal utama yang akan dikaji. Pertama, akan dilihat bagaimana tren penggunaan internet di Indonesia. Gaya hidup masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif terhadap penggunaan internet menandai bahwa penetrasi pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual akan lebih mudah dilakukan via internet. Dengan kata lain, Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual perlu membangun sarana prasarana yang mampu menyediakan informasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang mudah diakses secara *online* oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan internet dan kondisi pandemi COVID-19 melahirkan tren lainnya dalam bidang pendidikan, yaitu pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, data penetrasi internet dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia dapat dilihat sebagai faktor sosial yang memiliki pengaruh dalam pembentukan sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual yang layak.

Peluang dari Faktor Teknologi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku *Intellectual Property Office* di Indonesia telah menerapkan penggunaan aplikasi elektronik dalam pengajuan permohonan kekayaan intelektual, untuk tetap dapat relevan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada. Keberadaan layanan HaKi yang berbasis *online* dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual dalam merumuskan salah satu fungsi utamanya.

4. Analisis Ancaman (Threat)-PEST

Ancaman dari Faktor Politik

Salah satu bentuk ancaman dari faktor politik adalah bagaimana negara lain memandang Indonesia dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual. Posisi Indonesia yang cenderung rendah menghasilkan *trickle down effect* bagi berbagai permasalahan lainnya. Apabila ditinjau lebih mendalam dari nilai GIPC maka terlihat bahwa *enforcement of IP Rights* mendapatkan nilai yang paling rendah. *Enforcement of IP Rights* merupakan kategori yang mengukur pelaksanaan

tindakan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan penegakan prosedur hukum bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

Ancaman dari Faktor Ekonomi

Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan bukan hanya peralatan yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan KI, tetapi juga perlu dipertimbangkan penyempurnaan kapabilitas SDM yang mengoperasikan peralatan tersebut. Berdasarkan hasil kajian, sebagaimana tercantum dalam sub bagian SDM dan fasilitas, perlu adanya perhitungan yang riil dan perhitungan manfaat yang didapatkan dari berbagai kegiatan belanja sarana dan prasarana.

Ancaman dari Faktor Sosial

Kesadaran atas kekayaan intelektual pada masyarakat masih belum merata. Beberapa bukti empirik penelitian nasional masih menemukan bahwa pada beberapa kelompok terutama kelompok usaha mikro dan kecil masih belum sepenuhnya memahami kekayaan intelektual. Adanya disparitas dalam pemahaman pentingnya kekayaan intelektual, memiliki beberapa efek samping seperti kurangnya kepedulian terhadap isu KI, yang juga berdampak pada minimnya minat masyarakat untuk tergabung dalam beberapa layanan Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual.

Ancaman dari Faktor Teknologi

Salah satu ancamannya adalah disparitas (kesenjangan) akses internet di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun sudah tersedia sejumlah aplikasi yang dapat membantu pendidikan dan pelatihan untuk perlindungan HaKi, terdapat kemungkinan bahwa aplikasi tersebut tidak dapat diakses. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai dalam pembuatan situs maupun aplikasi Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual.

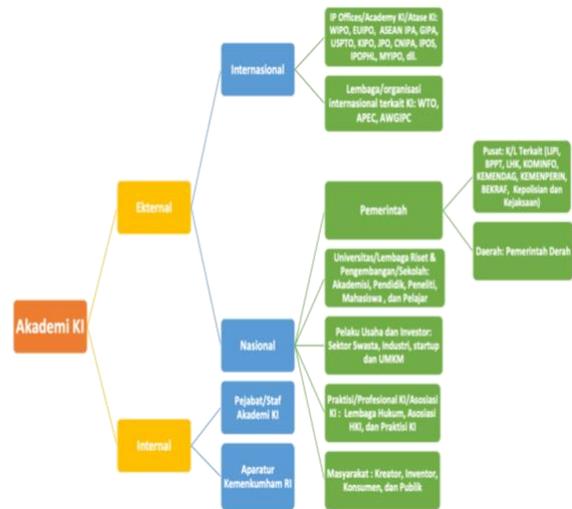


FUNGSI DAN STAKEHOLDERS PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (PIPKI)

Dalam kajian *Grand Design Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual (2021)* yang disusun oleh *Center for Studies of Governance and Administrative Reform (UI CSGAR)*, fungsi-fungsi Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual (PIPKI) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan data dan informasi kekayaan intelektual;
2. Pelayanan informasi publik terkait kekayaan intelektual;
3. Pengembangan kompetensi pemangku kepentingan kekayaan intelektual mencakup pegawai Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan dunia usaha dalam hal sistem dan penyelenggaraan kekayaan intelektual; dan
4. Advokasi, asistensi dan fasilitasi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, masyarakat dan dunia usaha dalam pencatatan dan hilirisasi kekayaan intelektual.

Kajian ini mengidentifikasi pemangku kepentingan yang potensial untuk terlibat dalam PIPKI agar dalam merancang kegiatan nantinya lebih terfokus dan tepat sasaran. Merujuk kepada Franklin (2020), pemangku kepentingan internal adalah pejabat (*officials*), staf/pengurus (*administrator*) dan pakar substansi (*subject matter experts*) yang bekerja dalam organisasi, sementara pemangku kepentingan eksternal mengacu kepada individu, kelompok, organisasi atau kolektif yang berada di luar organisasi namun bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi yang bersangkutan.



Gambar 1. 1 Pemangku Kepentingan Akademi KI Indonesia (PIPKI)

Dengan menjalankan fungsinya sebagai pusat pengelolaan data dan layanan informasi, PIPKI berperan menjadi balai kliring (*clearing house*). Untuk menjalankan fungsinya sebagai *clearing house*, PIPKI dituntut untuk menguasai pengelolaan informasi dan pengetahuan (*knowledge management*) yang efektif. Dengan menerapkan *knowledge management*, balai kliring memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi menjadi sesuatu yang bernilai (pengetahuan) dan bisa diakses oleh lebih banyak pihak. *Knowledge Management* juga membuat pengetahuan semakin berkembang karena memfasilitasi pertukaran data/informasi antar pemilik data/informasi secara terus menerus.

SARANA DAN FASILITAS NON FISIK PIPKI

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyiapan kebutuhan SDM untuk menunjang misi Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual atau *IP Academy* diperlukan sejumlah personil yang mampu menopang tujuan strategisnya. Untuk menjalankan rincian



aktivitas yang telah disebutkan di atas, kerangka layanan yang akan diberikan oleh PIPKI kedepannya meliputi:

- 1) *Trainings*, yang mencakup:
 - a. Pelatihan klasikal (*offline trainings*) bidang KI untuk pejabat pemerintahan dan ASN, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - b. Pelatihan daring (*online trainings*) bidang KI untuk pejabat pemerintahan dan ASN, masyarakat, dan dunia usaha.
- 2) *Consultancy and advisory*, yang mencakup:
 - a. Pembinaan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - b. Pembinaan utilisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. *Hub/cooperation center* (termasuk *innovation incubation*).
- 3) *Information center*, yang mencakup:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Museum; dan
 - c. Pusat informasi dan penyiaran KI.

Sebagai langkah awal penyiapan dan penataan SDM, Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia dapat menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan *milestone* dalam pengembangan kelembagaannya. Hal ini mempertimbangkan cakupan kerja dan aktivitas yang tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Data SDM per Juni 2021 dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yang saat ini mendukung fungsi DJKI adalah 571 personil dengan ragam kompetensi yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan kebutuhan atas sumber daya untuk dapat mendukung IP Academy ini, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian tertentu untuk kebutuhan pendukung proses sebagai staf administrasi maupun staf pengajar dengan keahlian khusus. Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan program dapat dikelompokkan kedalam 2 kategori meliputi : SDM Staf Administrasi dan SDM Staf Pengajar

Dalam pengembangan SDM PIPKI dimungkinkan jumlah personil terbesar ada pada staf administrasi untuk teknologi informasi yang

menunjukkan pemanfaatan TI untuk menunjang aktivitas utama pada *IP Academy*. Hal ini selaras dengan kegiatan *IP Academy* untuk pengembangan kapasitas dengan penekanan pada hal-hal berikut :

- Pemetaan Kelompok Sasaran dan Analisa Kebutuhan terhadap Kekayaan Intelektual
- Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, Modul dan Konten Ajar
- Perancangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran (*Learning Delivery Design*)
- Pengembangan Aplikasi Multimedia untuk Pembelajaran (Video, Aplikasi, Software dan Tools lainnya)
- Pengembangan dan Pemutakhiran Portal Belajar Berbasis Web
- Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Selain itu keberadaan staf administrasi lainnya dimaksudkan untuk menopang peran baru DJKI untuk mewujudkan PIPKI yang solid dalam melaksanakan fungsi-fungsi *creation, protection, dan utilisation* seperti yang diharapkan.

SARANA DAN FASILITAS FISIK PIPKI

A. TINJAUAN ARSITEKTUR

Perubahan kehidupan akibat pandemi COVID-19 juga berdampak kepada bidang arsitektur dalam bentuk perubahan meruang secara fisik menjadi meruang secara virtual. Kebutuhan ruang fisik yang berdasarkan kenyamanan dan keamanan berubah menjadi ruang virtual yang tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan tetapi dalam arti yang berbeda.

Dengan demikian kegiatan perkantoran bidang jasa dan usaha berubah menjadi ruang yang fleksibel dan hibrida antara kebutuhan ruang fisik dan ruang virtual serta bentuk ruang yang kolaboratif guna mengantisipasi perubahan-perubahan aktivitas kegiatan berkantor dimasa depan. Kata kunci ruang yang **fleksibilitas, hibrida dan kolaboratif** (*flexibility, hybrid and collaborative space*) dalam membentuk ruang perkantoran pada saat ini menjadi tren kekinian



dan upaya untuk segera merubah ruang kantor lama menjadi ruang yang fleksibilitas, hibrida dan kolaboratif menjadi kebutuhan.

Dalam kajian PIPKI Indonesia untuk biang sarana dan prasaran terutama bidang arsitektur, pembahsan akan difokuskan kepada mengkaji tentang **Working Patterns** yang ada di subjek penelitian yaitu Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual (PIPKI) Indonesia milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal kebutuhan dan transformasi bentuk sarana dan prasarana untuk kegiatan PIPKI Indonesia dengan menggunakan kata kunci ruang yang **fleksibilitas, hibrida dan kolaboratif** (*flexibility, hybrid and collaborative space*).

Konsep Arsitektural

Mendesain ulang area kerja dengan zonasi yang memperhatikan jarak aman pada saat ini akan menjadi standar baru untuk desain kantor. Ruang kerja yang fleksibel menjadi alternatif tata letak (*layout*) ruang kerja di kantor untuk jangka panjang. Tempat kerja dengan konsep ruang terbuka (*open plan*) yang telah berkembang selama abad ke-20 adalah produk dari manajemen yang mengejar efisiensi dapat kembali menjadi strategi pada masa kini dengan imbuhan furniturre modern. Bentuk yang ditawarkan adalah *Central Form, Linear Form, Radia Form, Clustered Form dan Grid Form* atau dapat digabungkan satu sama lain secara koheren sesuai dengan sifat hubungan ruang yang ada sehingga dapat membentuk konfigurasi ruang secara keseluruhan.

Ketika pandemi COVID-19 menyerang, maka kegiatan berkantor bergeser kantor hanya akan menjadi tempat kedua untuk menjalankan tugas atau melakukan pertemuan rutin dan banyak melakukan hal pekerjaan dari rumah. HBR menyebutkan tentang *knowledge worker* yang melakukan kerja di ruang hibrida berkat fungsi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang.

B. KONSEP BANGUNAN GEDUNG

Green Building

Dalam rangka menjadikan bangunan ini sesuai dengan syarat ketentuan bagi bangunan gedung hijau pendekatan analisa perencanaan mempergunakan

konsep-konsep bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta yaitu dari segi Selubung Bangunan; Sistem Pengkondisian Udara & Ventilasi; Sistem Pencahayaan; Sistem Listrik dan Tansportasi Vertikal; Efisiensi Air; dan Pengelolaan Lansekap.

Universal Desain

Selain dari *Green Building* maka konsep universal desain juga akan diterapkan ke dalam arsitektur PIPKI Indonesia. Konsep ini guna mengakomodir kondisi perbedaan yang terjadi dalam masyarakat seperti masalah penggunaan tangan kanan atau tangan kiri, tentang disabilitas dan tentang kemudahan pengguna hasil desain.

Konsep *Universal design* in juga akan diterapkan mengingat PIPKI Indonesia akan melayani beragam kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dengan menerapkan *Universal design* akan meminimalkan kegagalan desain bangunan dari sisi kenyamanan dan keamanan bagi kepentingan umum.

Arahan Gubahan Massa

Gubahan massa bangunan perkantoran pada akhirnya juga mengikuti dari konsep yang ditawarkan yaitu; **fleksibilitas, hibrida dan kolaboratif**. Gubahan massa atau komposisi dari massa bangunan dengan konsep tersebut diharapkan dapat membentuk ruang ruang yang sesuai dengan protokol kesehatan bangunan gedung (*health building*) yang baru, *green building dan universal design*.

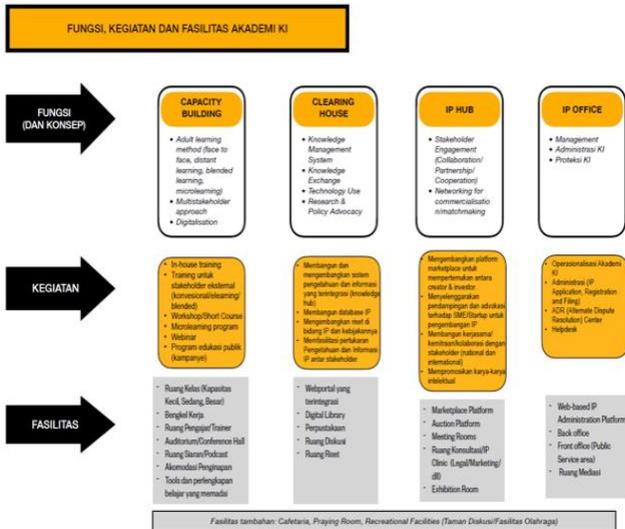
c. PROGRAM ARSITEKTUR

Program Arsitektur adalah suatu proses mengidentifikasi & mendefinisikan kebutuhan desain fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancang. Dari hasil analisis fungsi dan kegiatan didapati beragam ruang yang akan digunakan oleh PIPKI Indonesia terbagi menjadi 4 kegiatan utama yaitu:

- a. **Capacity building** dengan kegiatan utama sebagai *education and learning center*

POLICY BRIEF – STUDI KELAYAKAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

- b. **Clearing House** dengan kegiatan utama sebagai *knowledge and excellence center*
- c. **IP Hub** dengan kegiatan utama sebagai *networking center*
- d. **IP Office** dengan kegiatan utama sebagai *building management and facility maintenance*



Gambar 1. 2 Aktivitas PIPKI dan Kebutuhan Ruang

Konsep interior bangunan gedung PIPKI Indonesia memiliki citra modern dan fungsional, terutama memperhatikan faktor ergonomi yang menyatukan kenyamanan orang dalam bekerja, menggunakan peralatan dan lingkungan kerja. Dari segi program ruang, memperhatikan alokasi ruang secara lebih tepat sesuai dengan konsep yang ingin diterapkan yaitu **fleksibilitas, hibrida dan kolaboratif (flexibility, hybrid and collaborative space)**. Perencanaan ruang ini dapat juga sebagai pedoman dalam penggunaan ruang gedung baru maupun dalam bangunan yang ada atau direnovasi sebagai bentuk perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan ruang untuk PIPKI Indonesia.

A. *Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)*

Ruang Layanan Kelas (Classroom Service)

adalah ruang yang secara langsung melayani satu atau lebih ruang kelas sebagai perpanjangan dari kegiatan di ruang tersebut, dalam hal ini termasuk ruang

proyeksi, ruang Audio/Video, telekomunikasi bilik kontrol, ruang persiapan, lemari, area penyimpanan, dll. Ruang kelas dalam kegiatan PIPKI Indonesia terdiri kelas umum dan ruang kelas khusus sebagai berikut;

1. **Ruang kelas seminar** atau kelas umum, dengan kapasitas besar, sedang dan kecil
2. **Ruang kelas khusus kuliah-demonstrasi** berbentuk *workshop* atau laboratorium
3. **Ruang kelas khusus serba guna** berbentuk auditorium atau *conference hall*

Komposisi dari ketiga jenis tersebut akan lebih banyak menggunakan kelas seminar atau kelas umum. Ruang kelas sebagai fasilitas utama biasanya sangat mewakili keberadaan sebuah institusi, bisa mencapai 20% s/d 30% dari kebutuhan ruang. Pada masanya, ruang kelas tipe seminar kecil berkapasitas 30 orang dengan kapasitas optimal dan merupakan ruang yang paling fleksibel karena dapat dengan mudah mengubah layout interior dan kebutuhan furniture yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ruang Layanan Workshop (Workshop Service)

adalah ruang yang secara langsung melayani satu atau lebih ruang workshop sebagai perpanjangan dari kegiatan di ruang tersebut, dalam hal ini termasuk ruang proyeksi, ruang Audio/Video, telekomunikasi bilik kontrol, ruang persiapan, lemari, area penyimpanan, dll. Ruang workshop masuk sebagai fasilitas utama biasanya sangat mewakili keberadaan sebuah institusi, dengan kapasitas 30-45 orang. Ruang Workshop tidak fleksibel dikarenakan perlengkapan yang ditempatkan bersifat statis tidak mudah dipindahkan.

Ruang Layanan Siaran Podcast

adalah ruang guna menunjang kegiatan *broadcast* termasuk di dalamnya adalah bilik kontrol telekomunikasi, ruang persiapan, lemari, dan area persiapan dan penyimpanan. Untuk PIPKI Indonesia dapat dibentuk sebuah studio siaran mini sehingga bisa melakukan kegiatan edukasi dengan melakukan siaran informasi yang terkait. Kegiatan studio mini meningkat pesat setelah pandemi dikarenakan kebutuhan akan informasi dan interaktif dengan menggunakan media ini sehingga dapat menjangkau seluruh Indonesia.



Ruang Layanan tutorial ruang yang secara langsung melayani ruang tutorial termasuk ruang arsip, dapur kecil ruang istirahat yang melayani area kantor, lemari ruang catatan, ruang perlengkapan kantor.

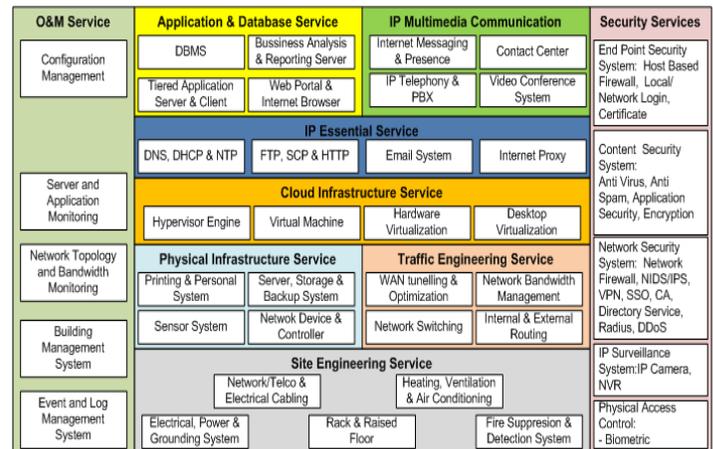
Akomodasi Inap

Skema program raung dari kegiatan akomodasi inap, sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas membutuhkan sekitar 10% s/d 20% dari keseluruhan luas bangunan. Besaran mengikuti kebutuhan jumlah personel yang akan menggunakan. Akomodasi ini dapat diletakan terpisah dari kegiatan pengembangan kapasitas lainnya atau disatukan dengan luas maksimum sesuai kebutuhan dengan memperhatikan luas ruang yang tersedia dan dengan persyaratan minimal semua ruang kegiatan tersedia sambungan daya listrik sambungan LAN/Internet/WIFI dan pengkondisian udara yang memperhatikan unsur kesehatan.

B. Infrastruktur TIK

Infrastruktur TIK merupakan lapisan paling dasar yang memberikan dukungan dan layanan-layanan yang dapat digunakan oleh lapisan-lapisan di atasnya. Rancangan arsitektur infrastruktur TIK untuk PIPKI disusun dengan mengacu pada *good practices* untuk memastikan bahwa infrastruktur TIK dapat selalu menyediakan layanan yang handal untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan-layanan pada *IP Academy*.

Layanan infrastruktur yang nantinya dimiliki oleh PIPKI terdiri dari 6 (enam) kelompok yang mencakup layanan untuk operasional dan pemeliharaan, aplikasi dan basis data, infrastruktur *cloud*, infrastruktur *data center*, infrastruktur jaringan, dan keamanan. Untuk lebih jelasnya, layanan-layanan tersebut ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1. 3 Layanan Infrastruktur TIK